Wakil Bupati: Pemkab Pasuruan Siap Maksimalkan Percepatan Implementasi Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah

Kamis, 8 Desember 2022

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menyatakan kesiapan Pemkab Pasuruan mendukung percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan setelah mengikuti Rakor Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo telah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung digitalisasi daerah, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Wakil Bupati Mujib Imron meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Akhmad Khasani, untuk meningkatkan PAD melalui digitalisasi. Hal ini diwujudkan dengan penggunaan alat perekam digital di hotel, restoran, dan tempat-tempat lain untuk mencatat transaksi. Kementerian Kominfo juga menekankan perlunya seluruh pemerintah daerah untuk memaksimalkan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Pemerintah Pusat telah menyediakan 8 satelit untuk menjangkau semua wilayah di Indonesia dan mendukung digitalisasi. Wakil Bupati Mujib Imron optimis bahwa digitalisasi transaksi keuangan daerah akan tercapai dengan hasil maksimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif yang besar, terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam satu tahun terakhir, termasuk di Kabupaten Pasuruan.

Dalam Rakor Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Wakil Bupati Pasuruan didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Akhmad Khasani, dan Kepala Dinas Kominfo, Syaifudin Akhmad. Presiden RI telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan optimal, sehingga mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.